BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian secara keseluruhan sesuai dengan berbagai rumusan masalah yang terdapat pada Bab I dan memberikan saran bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian Sengketa Jepang-Tiongkok Dalam Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu (2012-2014).

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan salah satu masalah yang paling sulit dan sensitif dalam hubungan bilateral Jepang-Tiongkok. Baik Jepang maupun Tiongkok sama-sama mengklaim Kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai bagian dari wilayah mereka, terlebih pada saat laporan dari *United Nations Economic Commission for Asia and the Far East* (UNECAFE) pada (1968-1969) yang menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu mengandung cadangan gas dan minyak yang begitu besar.
2. Dengan tindakan Jepang yang menasionalisasikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu pada September 2012, Tiongkok kembali menunjukkan sikap yang tegas dengan menerbitkan *white paper* yang menegaskan Kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai bagian teritorialnya, sehingga menolak ajakan Jepang untuk menyelesaikan permasalahan sengketa

Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu melalui Mahkamah Internasional pada November 2012 dan memasukkan klaimnya atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu kepada PBB pada bulan Desember 2012.

3. Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu sangat penting untuk menggambarkan perbatasan maritim antara Jepang dan Tiongkok. Munculnya perbedaan paham garis perbatasan Laut Tiongkok Timur hingga kini belum dicapai kesepakatan bersama, walaupun baik Jepang dan Tiongkok sama-sama meratifikasi dan negara partisipan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), sehingga tidak heran apabila kedua negara berusaha keras untuk memperebutkan Kepulauan Senkaku/Diaoyu untuk menunjukan kedaulatan dan integeritas nasional masing-masing.
4. Dalam perbedaan persepsi sejarah atas kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu baik Jepang maupun Tiongkok bermuara pada klaim yang berbeda. Jepang berpendapat bahwa dalam hal sengketa tersebut Tiongkok tidak bisa membuktikan atas kepemilikannya karena sudah jelas Jepang baik secara sejarah maupun bukti-bukti tersimpan dalam pemerintahan Jepang, sedangkan Tiongkok berpendapat sejak Dinasti Ming (1368-1644) yang dimana Tiongkok membuka peta sejarah yang dimilikinya.
5. Pada tahun 2012, Tiongkok secara aktif mengirimkan kapal Angkatan Laut maupun pesawat-pesawat pengintai di sekitaran Kepulauan Senkaku/Diaoyu bahkan sering harus berhadapan langsung dengan kapal

serta pesawat patroli Jepang. Berbagai tindakan agresif ini merupakan tindakan tegas yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dan berdampak pada kerugian yang lebih besar pada Jepang.

6. Melihat pada kondisi dan alasan terjadinya sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang sedang terjadi antara Jepang dan Tiongkok saat ini bahwa kedua negara tersebut memiliki kepengtingan yang antara lain adalah integritas teritorial dan kemakmuran ekonomi. Karena Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan wilayah yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang besar sehingga kedua negara berpikir wilayah tersebut merupakan aset yang harus di perjuangkan karena untuk kemajuan bangsa dan negaranya.
7. Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam penyelesaiannya karena Jepang tetap berusaha untuk menjaga status quo administrasinya atas kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu sedangkan Tiongkok tetap kepada fakta-fakta sejarah yang dimilikinya pada beberapa periode Dinasti Ming dan Qing. Politik luar negeri yang dilakukan Jepang terhadap Tiongkok dengan menggunakan instrumen diplomasi dan kerjasama tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran bagi masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu melalui skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Jepang, sebagai upaya Jepang untuk mempertahankan kepemilikannya atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu Jepang harus melakukan politik luar negeri tertentu terhadap Tiongkok. Politik luar negeri Jepang dibentuk berdasarkan sumber internal dan eksternal yang berdasarkan sumber yaitu: sistem politik, kondisi ekonomi, dan ketersediaan sumber daya alam. Sedangkan sumber eksternal yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri Jepang yaitu, kondisi regional dan isu-isu global.
2. Untuk pemerintah Tiongkok, dalam proses penyelesaian sengketa harus dapat memberikan sinyal yang positif terhadap kedua negara. Dalam hal ini Tiongkok diharuskan lebih terbuka untuk Jepang dalam proses penyelesaian baik dengan jalur hukum internasional maupun politik.
3. Dalam perjalanan yang panjang sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu dalam pandangan internasional masih belum bisa ditetapkan untuk siapa yang berhak atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu, dalam hal ini solusi terbaik adalah membangun *Joint Development* di wilayah yang disepakati bersama terlebih dahulu. Duduk di meja perundingan harus segera diwujudkan karena jika *Join Development* dilakukan setelah menunggu sengketa berakhir maka kerugianpun akan besar pula untuk pemanfaatan dalam wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu.
4. Untuk peneliti yang lain, yang menginginkan penelitian yang sama diharapkan melakukan penelitian dengan menggunakan dan menyajikan data-data dan analisa yang lebih akurat. Selain itu peneliti diharapkan

dapat melakukan kajian dari permasalhan dan sudut pandang yang berbeda sehingga akan memperluas pemikiran peneliti dalam hal pengetahuan dan bermanfaat untuk pembaca serta peneliti yang lainnya. Peneliti juga menyadari bahwa, dalam pembahasan penelitian ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat kurang, oleh karena itu diharapkan bagi yang hendak melakukan penelitian menggunakan objek dan variable penelitian yang sama agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang terkait dengan permasalahan skripsi yang di teliti.